



**KEBIJAKAN TATAKELOLA
KELAUTAN INDONESIA**
(Indonesia Ocean Governance Policy)

PROF. DR. IR. TRIDOYO KUSUMASTANTO, MS.

KEBIJAKAN TATAKELOLA KELAUTAN INDONESIA

(Indonesia Ocean Governance Policy)

Tridoyo Kusumastanto



KATA PENGANTAR

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*the largest archipelagic country in the world*), memiliki potensi pengembangan ekonomi nasional melalui pembangunan kelautan . Hal tersebut didukung fakta geografis bahwa Indonesia memiliki luas laut 2/3 dari wilayah dengan kandungan sumberdaya pulih (*renewable*) dan tidak pulih (*non renewable*) yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Indonesia juga memiliki posisi geopolitis dan geostrategis yakni berada di antara dua benua yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan demikian Indonesia dapat memainkan peran strategis dalam percaturan internasional melalui peningkatan pembangunan kelautan secara optimal dan lestari.

Namun demikian pembangunan kelautan tersebut kompleks karena menyangkut multisektor (perikanan, pariwisata bahari, energi dan sumberdaya mineral, industri kelautan, transportasi laut, bangunan kelautan dan jasa kelautan) sehingga melibatkan berbagai lembaga negara, swasta, maupun masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan kelautan.

Dengan karakteristik tersebut maka koordinasi dan sinergi lembaga-lembaga tersebut merupakan unsur penting karena keberhasilan pembangunan tidak hanya disarkan pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya tetapi harus didukung oleh tatakelola kelautan (*ocean governance*). Dengan tatakelola kelautan yang baik maka pembangunan kelautan yang optimal dan lestari dalam rangka mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dapat segera diwujudkan.

Buku ini disusun sebagai pemikiran awal tentang tatakelola kelautan Indonesia yang harus dikembangkan sehingga arah, peran dan mekanisme dalam manajemen pembangunan kelautan Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Semoga buku ini bermanfaat dalam rangka mengembangkan pemikiran pembangunan kelautan yang bermanfaat bagi peningkatan kemakmuran bangsa dan negara.

Bogor, Juli 2010

Tridoyo Kusumastanto

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	1
2. URGENSI POLITIK KELAUTAN	5
3. "RENAISSANCE" PEMBANGUNAN KELAUTAN.....	5
4. REKONSTRUKSI BIROKRASI	7
5. TANTANGAN PEMBANGUNAN KELAUTAN GLOBAL DAN TATA KELOLA KELAUTAN	9
6. KEBIJAKAN TATAKELOLA KELAUTAN (OCEAN GOVERNANCE POLICY)	17
6.1. Format dan Arah Kebijakan Tatakelola Kelautan.....	17
6.2. Formulasi Pembangunan Kelautan Pusat dan Daerah.....	29
6.3. Aransemen Kelembagaan dalam Tatakelolala Kelautan	31
7. PENUTUP	39
DAFTAR BACAAN	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komitmen dan implementasi WSSD Tahun 2002	13
Tabel 2. Ekspor Produk Hasil Laut Indonesia ke Amerika Serikat 1998-2002 (dalam Ribu US\$)	15
Tabel 3. Jumlah Gabungan Utang Luar Negeri Pemerintah dan Swasta di Indonesia (US\$miliar).	16
Tabel 4. Komponen, Faktor dan Perwujudan Spasial dari <i>Ocean Governance</i> . ..	23
Tabel 5. Institusi-institusi Negara yang berkaitan dengan Kelautan.....	31
Tabel 6. Isu-Isu Pokok Pembangunan Kelautan	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Fungsi pemerintahan dalam kerangka <i>Ocean Governance</i> (Sumber: Nichols and Sutherland 2003).	21
Gambar 2. Perubahan Pendekatan <i>Ocean Governance</i> dari visi modernisme menuju visi post Modernisme (Sumber: Vallega 2001).....	22
Gambar 3. Tiga Pilar Pembangunan Kelautan Nasional.	24
Gambar 4. Model Alur Kebijakan Pembangunan Kelautan dalam Tatakelola Kelautan.	34

1. PENDAHULUAN

Membicarakan masa depan pembangunan kelautan tidak hanya menyangkut masalah sumberdayanya, melainkan menyangkut kinerja birokrasi yang mengelola dan menjalankan institusi negara dalam bidang kelautan serta kebijakan politik pemerintah maupun lembaga politik dalam rangka mengelola bidang kelautan untuk kesejahteraan bangsa yang memiliki wilayah perairan 2/3 dari luas wilayahnya. Pembangunan kelautan selama ini masih belum menjadi arus utama (*mainstream*) pembangunan nasional, padahal Indonesia memiliki potensi kelautan yang besar. Walaupun masih menghadapi permasalahan klasik seperti kemiskinan masyarakat pesisir (khususnya nelayan), illegal fishing, pencemaran dan kerusakan lingkungan laut., pembangunan kelautan juga dihadapkan pada permasalahan yang selama ini kurang diperhatikan secara serius yakni aspek bencana alam dari laut yaitu tsunami, seperti yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara maupun kebijakan menjaga kedaulatan NKRI, seperti krisis Ambalat. Selama ini faktor bencana alam tersebut kurang diperhatikan oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan di wilayah pesisir dan laut. Padahal Indonesia merupakan negara kepulauan yang dilalui oleh jalur gunung berapi yang masih aktif dan jalur patahan lempengan yang sewaktu-waktu dapat mengancam masyarakat yang ada di kawasan jalur tersebut. Tragedi tsunami tersebut selain telah menimbulkan hilangnya ratusan ribu nyawa manusia dan rusaknya sebagian besar infrastruktur di wilayah pesisir juga telah menimbulkan trauma bagi sebagian masyarakat Indonesia terhadap laut. Selain itu perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga perlu segera diselesaikan dan dikelola secara efektif sehingga kedaulatan NKRI tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Dalam kasus tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, di sebagian wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara, masyarakat baik dalam dan luar negeri merasakan kesedihan-kepedulian dan bantuan kepada penduduk yang terkena bencana terus mengalir. Dari kejadian tsunami tersebut jelas bahwa masyarakat pesisir dan wilayah pesisir yang terkena dampak utama, sehingga diperlukan sebuah langkah menyempurnakan visi pembangunan kelautan berkelanjutan yang nampak memudar setelah

terjadinya bencana. Masyarakat dan pejabat seperti kehilangan arah kemana pembangunan kelautan harus dibawa karena dihantui ketakutan, padahal jelas bahwa kita tinggal di negara kepulauan bukan kontinen, dengan demikian maka laut dengan segala manfaat dan ancaman adalah sebuah keniscayaan yang harus dihadapi dan tidak bisa dihindari. Dengan demikian justru kita harus memperkuat visi pembangunan kelautan dengan menyempurnakan aspek yang belum mantap (misal: mitigasi bencana) dalam rangka mengelola sumberdaya kelautan dengan cerdas sehingga dapat dicapai tujuan kesejahteraan dan keberlanjutan. Oleh karenanya sosialisasi mengenai pentingnya pembangunan kelautan berkelanjutan harus ditingkatkan.

Belum lepas dari berbagai persoalan tersebut, persoalan perbatasan laut Indonesia dan Malaysia kembali memanas. Meningkatnya ketegangan ini bersumber dari klaim sepihak Malaysia yang sebetulnya negara tetangga ini sudah tahu bahwa Ambalat bukanlah wilayahnya karena sudah dikelola Indonesia sekian lama, tetapi dalam pandangannya terhadap Indonesia yang sangat lemah dan terpuruk sehingga saatnya mereka dapat merebut wilayah tersebut, siapa tahu bisa didapatkan seperti Simpadan dan Ligitan. Dengan munculnya persoalan perbatasan tersebut telah menambah deretan permasalahan pembangunan kelautan yang harus secepatnya mendapatkan perhatian secara serius oleh pemerintah dan segenap komponen bangsa. Berbagai permasalahan tersebut harus segera diatasi dengan mengambil langkah kongkrit dalam menyusun visi, kebijakan dan strategi pembangunan kelautan yang berwawasan nusantara dalam kerangka otonomi daerah, sehingga dapat dicapai pembangunan kelautan sebagai kekuatan ekonomi nasional yang memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya di tanah airnya sendiri secara berkelanjutan. Dengan kompleksitas permasalahan dan aspek kelembagaan yang sangat menentukan maka kebijakan tatakelola kelautan (ocean governance policy) menjadi sangat penting sebagai instrument penting dalam implementasi visi pembangunan kelautan maupun kebijakan kelautan Indonesia.

Bidang kelautan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi akan menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam kerangka industri berbasis

sumberdaya alam (*resource based industries*) maupun fungsi laut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu :

- a. Kapasitas suplai sangat besar, sementara permintaan terus meningkat.
- b. Pada umumnya output dapat diekspor, sedangkan input berasal dari sumberdaya lokal.
- c. Dapat membangkitkan industri hulu dan hilir yang besar, sehingga menyerap tenaga kerja banyak.
- d. Umumnya berlangsung di daerah
- e. Industri perikanan, bioteknologi dan pariwisata bahari bersifat dapat diperbarui (*renewable resources*), sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
- f. Sedang sumberdaya tidak pulih seperti minyak, gas dan mineral memiliki kontribusi ekonomi yang besar serta industri maupun jasa memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.

Sementara itu, Bank Dunia (2003) dalam sebuah studinya tentang ekonomi Indonesia menggarisbawahi bahwa daya saing industri nasional saat ini telah bergeser ke arah industri berbasis kelautan. Oleh karena itu, tidak salah jika dukungan pembangunan dari berbagai pihak harus diberikan kepada bidang ini. Dukungan berupa keputusan politik serta pemihakan yang nyata dari seluruh instansi terkait, akan bisa menjauhkan dan menjaga Indonesia dari keterpurukan untuk kedua kalinya. Bidang kelautan dan perikanan seharusnya menjadi pilar keunggulan kompetitif bangsa dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kemakmuran rakyat.

Dengan demikian perlu diidentifikasi permasalahan mendesak yang perlu diakomodasikan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan perikanan di masa depan antara lain meliputi :

1. Pertambahan penduduk yang melaju dengan cepat memerlukan perhitungan seksama atas pemenuhan kebutuhan protein hewani (ikan) maupun kebutuhan sumberdaya maupun jasa lainnya yang berasal dari laut.

2. Penyeimbangan pertumbuhan bidang kelautan dengan pemerataan. Ada indikasi bahwa kenaikan produksi dan ekspor serta kontribusinya terhadap PDB nasional cukup signifikan, namun apakah pencapaian ini telah dinikmati oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat pesisir (nelayan dan pembudidaya ikan).
3. Praktek-praktek pemanfaatan-pemanfaatan sumberdaya laut secara illegal dan merusak masih merebak di setiap kawasan.
4. Terjadinya ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan antar kawasan dan antar jenis sumberdaya.
5. Masih adanya pemahaman yang sempit dalam implementasi otonomi daerah dan belum lengkapnya perangkat peraturan operasional (antara pusat, propinsi, kabupaten) yang menimbulkan egoisme kedaerahan yang tinggi.
6. Keterpaduan antar sektor perikanan, industri maritim, jasa kelautan, transportasi laut, pariwisata bahari, pertambangan dan energi, bioteknologi, dan bangunan kelautan lainnya perlu disinergikan dalam satu kesatuan kebijakan dan perencanaan yang komprehensif.

Dalam rangka mengarahkan pembangunan kelautan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen pembangunan yang efektif dan efisien maka manajemen pembangunan kelautan harus dalam suatu sistem tatakelola kelautan (ocean governance system). Kebijakan Tatakelola tersebut merupakan turunan dari kebijakan kelautan (*ocean policy*) saalamma seperti kebijakan ekonomi kelautan (*ocean economic policy*) yang juga merupakan turunan dari kebijakan kelautan sehingga merupakan pilar-pilar penting Kebijakan Pembangunan Kelautan Nasional (*National Ocean Development Policy*). Kebijakan tersebut merupakan acuan pembangunan kelautan baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Dengan demikian, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan serta pemanfaatan fungsi laut dapat dilaksanakan secara holistik mensinergikan semua sektor yang berkaitan dengan pembangunan kelautan. Hal ini karena pada dasarnya satu sektor dan sektor lainnya baik yang memanfaatkan sumberdaya daratan maupun laut akan saling melengkapi dan mendukung sehingga menghasilkan pemanfaatan pada

tingkat *optimal output* dari tanah dan air dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

2. URGENSI POLITIK KELAUTAN

Kebijakan politik pemerintahan saat ini belum fokus dalam menuangkan visi dan arah kebijakan pembangunan kelautan sebagai sebuah kebijakan politik yang akan menggerakkan arah pembangunan nasional dengan mensinergikan laut dan daratan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut terpampang nyata dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang disusun Bappenas, peran bidang kelautan yang terdiri dari sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan, industri kelautan, perhubungan laut, bangunan kelautan dan jasa kelautan masih sangat terbatas. Proses-proses politik “pengkerdilan” semacam ini merupakan sebuah kondisi yang menghambat kemajuan pembangunan kelautan di Negara Kepulauan terbesar didunia. Presiden sebagai Ketua Umum Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) didukung Menteri-menteri terkait seharusnya dapat mengambil peran lebih proaktif dalam mengembalikan kekuatan bahari dalam pembangunan perekonomian nasional melalui Revolusi Biru (*Blue Revolution*) yang dituangkan dalam Kebijakan Pembangunan Kelautan Nasional (Kusumastanto, 2002). Politik kelautan seharusnya juga menjadi komitmen partai politik sehingga kesadaran berbangsa yang berwawasan bahari mampu mewarnai keputusan politik dalam rangka menggerakkan segenap daya dan upaya untuk kemajuan pembangunan kelautan nasional. Dengan demikian budaya politik kelautan dapat memasuki relung-relung kehidupan berbangsa dan bernegara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) sesuai kodrat yang dimiliki sebagai negeri kepulauan dan negeri bahari.

3. ”RENAISSANCE” PEMBANGUNAN KELAUTAN

Dari politik kelautan yang membumi diharapkan dihasilkan kebijakan pembangunan kelautan yang mampu membangun kembali peran negara dalam

mengelola sumberdaya dan fungsi laut sebagai kekuatan ekonomi yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari krisis yang kita hadapi sekaligus menyiapkan wilayah kedaulatan yang untuk dan mampu untuk menopang pertumbuhan kesejahteraan bangsa Indonesia pada masa yang akan datang. Beberapa langkah kongkrit yang perlu segera dilakukan diantaranya adalah:

Pertama, perlu segera disusun dan dimplementasikannya Kebijakan Pembangunan Kelautan Nasional perlu segera diwujudkan interaksi antar sektor yang komprehensif dan sehingga keberhasilan seharusnya tidak didasarkan pada keberhasilan tiap Kementerian (baca: birokrasinya) tetapi lebih diukur dari keberhasilan program pembangunan kelautan nasional.

Kedua, pemerintah dan legislatif secara definitif perlu menyepakati Kebijakan Pembangunan Kelautan Nasional (National Ocean Development Policy) yang terdiri dari Kebijakan Kelautan yang selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Ekonomi Kelautan dan Kebijakan Tatakelola Kelautan. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan pijakan dalam membangun bidang kelautan nasional serta menyusun berbagai peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan kedaulatan negara kesatuan Indonesia yang didominasi oleh wilayah perairan laut.

Ketiga, lembaga-lembaga pemikir pembangunan kelautan yang dibentuk era reformasi politik seperti DEKIN tersebut, harus dapat berjalan secara maksimal. Agar fungsi tersebut dapat berjalan maka DEKIN dan kementerian yang menjadi pilar pembangunan kelautan perlu diberikan dukungan politik, finansial, infrastruktur serta sumberdaya manusia yang memiliki kapabilitas tinggi sehingga bisa bekerja secara optimal. Dokumen tersebut penting karena menyangkut eksistensi NKRI dan hajat hidup orang banyak. Harusnya seluruh institusi pemerintah yang berkepentingan terhadap bidang kelautan seperti perhubungan, perikanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, perindustrian, TNI-AL, Lingkungan Hidup dan sebagainya *all out* mendukung untuk menyelesaikan dokumen penting tersebut dengan baik. Dengan demikian, fungsi DEKIN untuk "mengkoordinasikan" maupun sebagai lembaga konsultasi dan memfasilitasi semua komponen masyarakat madani (*civil society*) dan institusi negara yang bergerak dalam bidang kelautan benar-benar dapat terimplementasikan. Peran DEKIN dalam menyusun kebijakan-kebijakan

terintegrasi serta berbagai peraturan dan perundangan multisektor lebih tepat karena “ego sektoral” diharapkan dapat diminimisasi.

Dengan demikian kritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2005) tentang adanya tumpang tindih aturan dalam bidang kelautan dalam sebuah pertemuan di DEKIN seharusnya mendapat tanggapan serius dari instansi terkait. Sayangnya, kritik dari presiden tersebut kurang ditindaklanjuti oleh institusi terkait dalam bidang kelautan sehingga kepedulian Presiden terhadap kelautan seharusnya menjadi momen penting bagi pembenahan carut marut bidang yang sangat penting bagi bangsa Indonesia.

4. REKONSTRUKSI BIROKRASI

Secara global kebijakan makro ekonomi Indonesia terkesan lebih berorientasi pada ekonomi pasar bebas yang dicirikan dengan privatisasi, liberalisasi perdagangan, penghapusan kebijakan subsidi, kurang berpihak pada ekonomi rakyat dan kurang mendorong pembangunan sektor riil. Namun demikian diharapkan model kebijakan ini harus dipadukan dengan kegiatan ekonomi rakyat yang sangat menyentuh kegiatan masyarakat khususnya yang berada di pesisir. Kebijakan makro ekonomi yang demikian sudah barang tentu berpengaruh signifikan terhadap bidang kelautan, sebagai contoh analisis adalah sektor perikanan yakni perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan, usaha mikro, kecil dan menengah kelautan (UMKMK), yang merupakan basis ekonomi rakyat di pesisir dan pulau-pulau kecil serta menyangkut hajat hidup orang banyak yang didominasi oleh “wong cilik”. Persoalannya, sejauhmana sikap dan kepekaan (*sense of crisis*) kalangan birokrasi yang bekerja pada bidang kelautan ? Sejauh ini birokrasi dalam bidang kelautan maupun bidang lainnya baik di level *upper structural*, *middle structural* maupun *bottom structural* terkungkung dalam suasana birokrasi yang kaku sehingga *sense of crisis* individu yang dimiliki tidak dapat diaktualisasi dalam institusi dan bahkan terdapat proses pengelolaan pembangunan yang memungkinkan munculnya para pencari rente ekonomi (*rent seeking*) melalui mekanisme proyek di pusat maupun daerah tanpa tindakan kongkrit yang berarti untuk mengatasi hal tersebut. Dengan

perkataan lain secara kelembagaan, birokrasi bekerja kurang memiliki komitmen yang jelas sebagai pelayan masyarakat serta sistem birokrasi proyek lebih kental dibanding pelayanan serta peran strategis dalam menyiapkan kebijakan dalam mengantisipasi perubahan lokal, regional dan global yang mendesak khususnya kesejahteraan masyarakat pesisir belum menjadi prioritas. Hal tersebut dapat terjadi karena visi dan misi kementerian kurang dapat dioperasionalkan di birokrasi maupun di masyarakat.

Dengan demikian dampak kebijakan-kebijakan pemerintah kerap kali tidak terukur untuk menghasilkan output yang telah digariskan misalnya: apa output pemberantasan illegal fishing pada perikanan nasional?. Hal lain adalah kalangan birokrasi belum mampu berperan dalam mempengaruhi kebijakan makro nasional baik secara individual kementerian maupun beberapa kementerian yang terkait dalam pembangunan kelautan (Kementerian yang menjadi Anggota DEKIN) sehingga kepentingan sektor dan masyarakat tidak dapat dikawal dengan baik. Oleh karena itu efektivitas birokrasi dalam mempengaruhi kebijakan makro harus dikembangkan termasuk meyakinkan kalangan DPR yang juga penting dalam menjalankan program-program pembangunan kelautan.

Lemahnya *sense of crisis* kalangan birokrasi yang mengelola dan menjalankan pembangunan kelautan serta kurangnya antisipasi terhadap kebijakan makro ekonomi pemerintah akan berpengaruh terhadap pembangunan kelautan di masa mendatang. Kondisi ini akan lebih parah lagi apabila kebijakan politik kelautan juga ikut melemah. Apabila dibiarkan terus menerus bukan tidak mungkin tatanan kelembagaan dan politik kelautan yang sudah terbangun selama ini akan pelan-pelan terdegradasi begitu saja. Akan tetapi, insan kelautan harus tetap optimis bahwa pembangunan kelautan tidak dalam posisi *the end of history*. Oleh karenanya diperlukan rekonstruksi birokrasi mulai dari *upper level*, *middle*, dan *bottom structural* serta rekonstruksi politik kelautan melalui perjuangan menghadapi pihak yang tidak membela kepentingan rakyat kecil dan pelaku UMKM kelautan yang berada di wilayah tanah air Indonesia.

5. TANTANGAN PEMBANGUNAN KELAUTAN GLOBAL DAN TATA KELOLA KELAUTAN

Pembangunan kelautan nasional tidak bisa terlepas dari pergolakan ideologi-politik yang senantiasa mewarnai hingar bingar percaturan dunia, hal tersebut diakibatkan masing-masing negara mempunyai tingkat kepentingan yang berbeda dalam menguasai peradaban maupun sumberdaya yang tersebar di berbagai belahan dunia. Laut dan lautan mengandung potensi sumberdaya dan memiliki fungsi yang strategis dalam persaingan antarbangsa. Terhempasnya ideologi sosialisme-komunisme yang disertai dengan bubarnya Uni Soviet menjadi beberapa negara yang lebih kecil mengukuhkan kapitalisme dan demokrasi liberal Barat menjadi pemenang sebagaimana yang diramalkan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya "The End of History and The Last Man". Benarkah begitu, apa kemenangan tersebut bukannya kebetulan? Terlepas dari "hayalan" Francis Fukuyama itu, Barat dengan berbagai programnya ternyata mampu mengukuhkan hegemoninya diberbagai dunia, khususnya di negara-negara berkembang (*developing countries*).

Globalisasi dan perdagangan bebas misalnya dapat mengakibatkan hegemoni negara maju dalam menguasai dunia dengan cara "menguasai" negara-negara berkembang yang umumnya sebagian besar terletak di kawasan Asia-Afrika. Dengan kata lain, negara maju akan senantiasa membuat "siasat" guna mengukuhkan dirinya menjadi pemenang terakhir dalam pergulatan sejarah bangsa-bangsa. Walaupun ancaman perdagangan bebas tanpa kendali dinyatakan dapat menghancurkan ekonomi global (Stiglitz, 2010).

Menurut Fukuyama (1992), kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal didasari oleh banyaknya ideologi ini dianut oleh negara-negara di seluruh dunia. Hal ini tercermin dari banyaknya pemikiran politik di seluruh dunia yang disertai dengan bermunculannya berbagai buku yang mengupas dan mengganggap kapitalisme dan demokrasi liberal sebagai satu-satunya ideologi yang paling ideal di seluruh dunia. Sementara itu, meskipun kapitalisme mendapatkan tentangan dan cemoohan, namun tetap menjadi primadona

banyak pihak karena kapitalisme menjanjikan kemakmuran ekonomi dan keadilan politik.

Namun demikian, kesuksesan Barat dalam menjalankan ideologinya belum tentu diikuti oleh negara-negara lain di luar Barat, seperti negara-negara berkembang yang tersebar di kawasan Asia. Dikarenakan, permasalahan sosial-budaya masyarakat masing-masing negara di kawasan Asia sangat kompleks (heterogen), beda sekali dengan yang terjadi di barat yang cenderung homogen. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kegagalan dalam era globalisasi yang diusung Barat. Bukannya kesejahteraan yang didapat, malah kemiskinan yang semakin menjadi-jadi.

Sebelum senjata globalisasi dikeluarkan untuk membendung antikapitalisme pasca keruntuhan formasi sosial kolonialisme, Barat mengeluarkan paham *developmentalisme*¹. Diskursus *developmentalisme* mencuat tahun 1949 pada saat Presiden Harry S Truman mengumumkan kebijakan pemerintahannya, dan sejak saat itu *developmentalisme* telah resmi menjadi bahasa dan doktrin kebijakan luar negeri Amerika Serikat (Fakih, 2001).

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa suatu kebijakan di satu negara belum tentu berhasil di negara lain. Betapa tidak, *developmentalisme* yang diagung-agungkan oleh Barat, pada tahun 1998 telah menimbulkan krisis "kebangkrutan" pembangunan di kawasan Asia, tidak luput Asia Timur yang selama ini dijadikan teladan keberhasilan pembangunan dan kapitalisme di Dunia Ketiga.

Terjadinya krisis pembangunan di kawasan Asia yang didalamnya termasuk Indonesia yang paling parah pada dasarnya merupakan bagian dari krisis sejarah dominasi dan eksploitasi manusia atas manusia lainnya. Menurut Fakih (2001), proses sejarah dominasi itu pada dasarnya dapat dibagi ke dalam tiga periode formasi sosial, yaitu: ***Pertama***, periode kolonialisme merupakan fase perkembangan kapitalisme di Eropa yang mengharuskan ekspansi secara fisik untuk memastikan perolehan bahan baku mentah. Melalui fase kolonialisme

¹ *Developmentalisme* dilontarkan dalam era "Perang Dingin" untuk membendung sosialisme, sehingga *developmentalisme* merupakan bungkus baru dari kapitalisme. Irene Gendzier (1985) dalam Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist, Yogyakarta, 2001, hlm 200.

inilah proses dominasi manusia terjadi dalam bentuk penjajahan secara langsung selama ratusan tahun. **Kedua**, periode neo-kolonialisme yakni modus dominasi dan penjajahan tidak lagi fisik dan secara langsung, melainkan melalui penjajahan teori dan dan ideologi. Fase kedua ini dikenal sebagai era pembangunan atau era developmentalisme yang ditandai dengan terjadinya kemerdekaan di negara-negara Dunia Ketiga. **Ketiga**, periode globalisasi yang sudah disiapkan sebelum krisis terhadap pembangunan berakhir. Dengan demikian, *mode of domination* telah disiapkan oleh Barat untuk kembali "menjebak" negara-negara Dunia Ketiga. Periode ketiga ini terjadi menjelang abad 21 yang ditandai dengan liberalisasi di segala bidang yang dipaksakan melalui *structural adjustment program* oleh lembaga finansial global, dan disepakati oleh rezim GATT dan Perdagangan Bebas, suatu organisasi global yang dikenal dengan *World Trade Organization* (WTO). Dengan demikian, istilah globalisasi dapat dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Namun jika ditinjau dari sejarah perkembangan ekonomi, globalisasi pada dasarnya merupakan salah satu fase perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal, yang secara teoritis telah dikembangkan oleh Adam Smith melalui *Wealth of Nation*. Dalam kenyataannya kesejahteraan dalam era global cenderung dimenangkan oleh negara maju karena persyaratan kekuatan ekonomi yang seimbang untuk terjadinya keadilan tidak pernah akan tercapai.

Lebih lanjut, Fakhri (2001) mengungkapkan bahwa secara teoritis sebenarnya tidak ada perubahan ideologi dari ketiga zaman tersebut. Namun terjadi perubahan yang canggih dalam hal pendekatan, mekanisme dan sistem yang secara ekonomi berwatak eksploitatif, secara politik berwatak represif dan secara budaya berwatak hegemonik dan diskursif, dari sebagian kecil elit masyarakat yang dominan terhadap rakyat kecil.

Oleh karena itu, di tengah perkembangan dunia yang semakin bergerak tanpa kendali ini², menuntut negara-negara berkembang (*developing countries*), khususnya Indonesia untuk lebih berhati-hati. Hal ini dikarenakan, globalisasi

² Dunia lepas kendali (*runaway world*) merupakan ibarat dari suatu perubahan dunia yang tidak tampak atau terasa seperti yang diperkirakan, sehingga dunia tampaknya justru bergerak di luar kendali. Anthony Giddens, *Runaway World : Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. xiv.

menyimpan setumpuk jebakan. Terlebih, sejak tahun 1995 setelah Indonesia resmi menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) dan meratifikasi seluruh perjanjian WTO, kewajiban Indonesia untuk secara konsisten menerapkan liberalisasi perdagangan semakin bertambah.

Selain jebakan di tingkat global, Inonesia pun dihadapkan pada jebakan di tingkat regional yang bergerak dalam dunia perdagangan. Ada beberapa perjanjian dengan area yang lebih kecil, misalnya keikutsertaan Indonesia ke dalam forum *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) maupun ACFTA (*Asean China Free Trade Agreement*). Bahkan, ada kesepakatan area pertumbuhan yang lebih kecil lagi seperti segitiga pertumbuhan Singapura, Johor dan Riau (SIJORI) dan Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina East Growth Triangle (BIMPEAGA). Selain itu, ada kawasan-kawasan pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil seperti Otorita Batam yang merupakan bentuk terkecil dari kesepakatan dagang yang memiliki kesepakatan kebijakan tersendiri dan otonom. Semua kesepakatan tersebut merupakan forum-forum WTO dalam skala yang lebih kecil dan lokal, yang membuat kita semakin sulit mundur dari komitmen tersebut. Kewajiban kita untuk menerapkan kebijakan yang tertuang dalam "letter of intent" yang telah disepakati dengan *International Monetary Fund* (IMF) semakin menambah deretan kewajiban untuk menghormati komitmen terhadap perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi itu³. Apabila Indonesia tidak berhati-hati serta kurang mempertimbangkan kepentingan nasional jangka pendek, menengah dan panjang maka akan Indonesia akan terjebak dalam kungkungan negara yang lebih maju serta akan terus tergantung dengan negara lain.

Konferensi pembangunan berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development*, WSSD) di Johansburg 26 Agustus – 4 September 2002 memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan kelautan nasional. Komitmen yang dihasilkan untuk implementasi WSSD Tahun 2002 disajikan pada Tabel 1.

³ Ida Susanti dan Bayu Seto (Ed), *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm 26.

Tabel 1. Komitmen dan implementasi WSSD Tahun 2002

Sektor	Komitmen	Inisiatif
Air dan Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas pada sanitasi dan akses air bersih, tenggat tahun 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Hibah AS sebesar US\$ 970 juta dalam tiga tahun Bantuan ADB US\$ 5 juta dan US\$ 500 juta untuk air bersih di kota-kota Asia
Energi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemakaian energi bersih, terbarukan dan efisien Menaikan akses energi 35 % penduduk Afrika 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada tenggat karena penolakan AS, Jepang dan OPEC 9 kontrak listrik Eropa sepakat dengan PBB memberi bantuan teknis dalam hal proyek energi berkelanjutan Dana US\$ 700 juta dari Uni Eropa dan US\$ 43 dari AS tahun 2003 PBB menerima 32 proposal kemitraan senilai US\$ 26 juta
Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Konvensi anti desertifikasi di Afrika Pengembangan program keamanan pangan di Afrika tahun 2003 	<ul style="list-style-type: none"> AS membantu US\$ 90 juta tahun 2003 Kemitraan pertanian yang diterima PBB bernilai sekitar US\$ 2 juta
Keanekaragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi kehilangan keanekaragaman hayati hingga tahun 2010 Menjaga cadangan perikanan dunia dengan tenggat 2015 Membentuk jaringan perlindungan kawasan laut hingga tahun 2012 Program dunia untuk perlindungan lingkungan kelautan dan pencemaran di daratan, tahun 2004 Tahun 2020 menghapus produksi bahan kimia yang merugikan manusia 	<ul style="list-style-type: none"> PBB menerima 32 kemitraan senilai US\$ 100 juta Senilai US\$ 53 juta diberikan AS untuk sektor kehutanan tahun 2002-2005 Dana Proyek lingkungan lewat <i>Global Environment Facility</i> senilai US\$ 2,9 miliar
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi polusi udara Meniadakan bahan perusak ozon 	<ul style="list-style-type: none"> Hibah dari AS US\$ 2,3 miliar tahun 2003 Kemitraan yang diterima PBB bernilai US\$ 3 juta

Sumber: TEMPO Tahun 2002.

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil komitmen WSSD yang akan mempengaruhi kebijakan kelautan nasional adalah berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati laut khususnya perikanan, dan perlindungan kawasan konservasi laut.

Politik globalisasi tidak hanya diaktualisasikan dalam perekonomian dunia yang berbentuk perdagangan bebas dan investasi tetapi juga dalam sektor kelautan. Hegemoni politik globalisasi dalam sektor kelautan telah menjangkiti "paradigma pemikiran" kalangan pengambil kebijakan di negeri ini. Pemerintah dan kalangan legislatif di Indonesia secara tidak sadar telah mempraktekan ideologi neo-liberalisme dalam kebijakan pembangunan nasional.

Hegemoni globalisasi dalam sektor kelautan bergerak pada level global dan regional serta internal negara. Pada level global dan regional, politik globalisasi membangun hegemoninya lewat intervensi perubahan hukum-hukum laut internasional, standarisasi dan labelisasi perdagangan produk hasil laut serta "dominasi dan penguasaan" melalui organisasi internasional maupun regional. Intervensi melalui hukum-hukum laut internasional diusung melalui isu lingkungan hidup sehingga melahirkan model pengelolaan laut secara global. Alasannya, lautan memiliki keterkaitan ekologis yang membentuk sebuah kesatuan ekosistem, sehingga perlu pengelolaan bersama lintas negara. Standarisasi dan labelisasi perdagangan produk hasil laut diusung lewat isu lingkungan guna menciptakan produk pangan yang aman. Alasannya, negara-negara berkembang banyak mengalami pencemaran lingkungan dan bahkan isu terbaru yang dikembangkan yakni *bio-terrorisme*. Alasan penerapan bioterorisme ini oleh Amerika Serikat adalah makanan menjadi produk yang rentan untuk digunakan media teror. Aturan bio terorisme ini telah ditetapkan melalui *The Public Health Security and Bioterrorisme Preparedness and Response Act of 2002*. Bagian terpenting dalam perundangan ini adalah *Title III* yang didalamnya terdapat *Subtitle A* mengenai pengamanan pasokan pangan (*Protection of food supply*). Hal ini berimplikasi pada ekspor produk hasil laut Indonesia yang berupa bahan pangan ke Amerika Serikat. Ekspor hasil laut Indonesia ke Amerika Serikat disajikan seperti Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Ekspor Produk Hasil Laut Indonesia ke Amerika Serikat 1998-2002 (dalam Ribu US\$)

Produk	Tahun				
	1998	1999	2000	2001	2002
Udang	188.739	167.327	190.806	155.508	153.093
Tuna	45.133	55.336	46.933	57.304	56.943
Udang Lobster	18	82	227	3	39
Ikan Laut	234	0	0	0	85
Salmon	272	212	0	0	14
Produk Ikan Lainnya	64.410	83.141	123.610	168.544	931.184
Total	298.805	306.097	361.576	381.411	400.429

Sumber: Biro Sensus Data Perdagangan USA, 2002.

Dengan diberlakukannya aturan ini menunjukkan bahwa ekspor produk-produk hasil laut Indonesia masuk ke Amerika Serikat dapat mengalami hambatan karena adanya aturan bioterorime tersebut. Ditolaknya produk udang Indonesia beberapa waktu lalu merupakan contoh praktik politik globalisasi selain faktor-faktor internal Indonesia

Dalam pengelolaan perikanan tuna terdapat penguasaan/ pengaturan oleh lembaga internasional/gobal. Dominasi dan penguasaan itu dilakukan melalui organisasi internasional *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) yang salah satu diantaranya adalah *Indian Ocean Tuna Comission* (IOTC). IOTC adalah sebuah organisasi regional yang mengelola perikanan tuna di perairan Samudera Hindia. Jepang yang sama sekali tidak menguasai perairan, namun merupakan pasar utama menjadi anggota dan memiliki pengaruh yang kuat terutama dalam pengaturan kuota penangkapan ikan dan jumlah kuota yang dimiliki setiap anggota. Melalui organisasi *Convention for Conservation of Sourthern Bluefin Tuna* (CCSBT), Jepang, bersama Australia dan Selandia Baru mengklaim penguasaan atas perikanan tuna sirip biru (*blue fin tuna*) di Samudera Hindia. Jepang berhak atas kuota 52 %, Australia 45 % dan Selandia Baru 3 %. Negara yang bukan anggota CCSBT apabila ketahuan menangkap ikan tuna di Samudera Hindia dianggap *illegal fishing*, terkecuali mengikuti syarat-syarat tertentu.

Hal lain yang juga menarik dari politik globalisasi adalah pemberian utang luar negeri oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang. Di bidang kelautan, utang luar negeri diperuntukan bagi pengelolaan sumberdaya kelautan, penyelamatan lingkungan dan pemberantasan kemiskinan. Program yang didanai utang luar negeri di Indonesia adalah *Coral Reef Rehabilitation and Management Programme* (COREMAP) untuk merehabilitasi terumbu karang, Program *Co-Fish* dan *Marine Coastal Resources and Management Programme* (MCRMP) yang berasal dari Bank Dunia (*World Bank*) maupun *Asian Development Bank* (ADB). Dampak politik globalisasi belum tentu mampu mengurangi kemiskinan masyarakat dan menyelamatkan lingkungan laut. Program-program dengan biaya utang luar negeri diharapkan mampu memperbaiki lingkungan pesisir, menaikkan pendapatan dan produksi, namun pada kenyataannya terdapat beberapa program yang telah dijalankan tidak berkelanjutan (*unsustainable*) bahkan mungkin mengalami kegagalan. Pada Tabel 3 menyajikan jumlah gabungan utang luar negeri Pemerintah dan Swasta di Indonesia (US\$ miliar).

Tabel 3. Jumlah Gabungan Utang Luar Negeri Pemerintah dan Swasta di Indonesia (US\$miliar).

Uraian	Donor	Jumlah	Porsi (%)
Utang pemerintah pusat		63,0	43,45
• Jepang	26,6		
• Bank Dunia	12,3		
• ADB	7,5		
• Jerman	3,5		
• USA	2,8		
• Lainnya	10,0		
Sektor Swasta		62,0	42,75
Lainnya		20,0	13,80
• IMF	10,3		
• Lainnya	9,7		
Total (96 % terhadap PDB)		145,0	100,00

Sumber: Bank Dunia *dalam* Rachbini 2001.

Dari Tabel 3. menunjukkan bahwa utang luar negeri Indonesia sudah mencapai 96 % dari total PDB nasional yang di dalamnya termasuk pinjaman untuk bidang kelautan. Pada level internal negara, hegemoni politik globalisasi dalam bidang kelautan di Indonesia dilakukan melalui intervensi perundang-undangan. Undang-Undang Perikanan (UUP) No. 31 Tahun 2004 perlu direvisi diantaranya adanya klausul tentang HP3 yang belum jelas arahnya dalam pengelolaan/pengusahaan perairan dan jiwanya belum menggambarkan karakteristik laut sebagai pemersatu wilayah. Perlu dikaji kembali sejauh mana kepentingan industri nasional dalam konteks ekonomi domestik tetap dibela dan sejauh mana kemungkinan beberapa pasal dalam UU tersebut dapat melindungi kepentingan-kepentingan negara maju dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Fenomenanya tidak berbeda jauh dengan UU Pengelolaan Sumberdaya Air serta beberapa UU yang diundangkan karena dianggap kurang membela dengan kepentingan nasional.

6. KEBIJAKAN TATAKELOLA KELAUTAN (OCEAN GOVERNANCE POLICY)

6.1. Format dan Arah Kebijakan Tatakelola Kelautan

Kebijakan Pembangunan Kelautan Nasional (National Ocean Development Policy) yang terdiri dari Kebijakan Kelautan (Ocean Policy), Kebijakan Ekonomi Kelautan (Ocean Economic Policy) dan Kebijakan Tatakelola Kelautan (Ocean Governance Policy) merupakan kebijakan terintegrasi dalam pembangunan nasional yang digunakan sebagai acuan pembangunan kelautan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang menintegrasikan pembangunan multisektor serta mensinergikan pembangunan berbasis laut maupun darat. Secara historis *national ocean development policy* sudah dicanangkan sejak 13 Desember 1957 ketika Perdana Menteri RI, Ir. Djuanda mengeluarkan sebuah deklarasi yang secara politik menyatakan bahwa:

“ segala perairan disekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Lalulintas yang damai melalui perairan-perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang”

Dengan deklarasi ini secara substansial memberikan inspirasi tentang wawasan Nusantara yang mencakup komponen kesatuan ekonomi, kesatuan wilayah dan kesatuan politik. Pasca deklarasi Juanda inilah muncul kemudian beberapa kebijakan dan peraturan yang berkaitan kelautan yang antara lain UU No. 4/Prp /1960 tentang perairan Indonesia, Pengumuman pemerintah tentang landas Kontinen, UU No. 1/1973 tentang landas kontinen Indonesia dan peraturan perundangan pendukungnya, UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, Konvensi Hukum Laut 1982 (UU No. 17 tahun 1985) sebagai pengganti UU No 4/1960 dan UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Kebijakan dan peraturan-peraturan itulah mengukuhkan tentang yurisdiksi perairan Indonesia. Namun, demikian sampai saat ini kebijakan pemerintah tentang kelautan belum muncul sebagai sebuah kebijakan politik dan ekonomi dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekalipun dalam GBHN 1994 telah dimunculkannya *point* tentang ‘kebijakan kelautan’. Perlunya *ocean policy* diharapkan akan menjadi perwujudan dari apa yang telah dicanangkan dalam Deklarasi Juanda. Inilah yang kemudian mendasari munculnya gagasan reposisi *ocean policy*. Secara defenitif ‘reposisi *ocean policy*’ adalah suatu kebijakan politik dan ekonomi dalam pembangunan ekonomi yang meninggalkan paradigma lama yakni menempatkan bidang kelautan sebagai marjinal (*periphery*), berubah menjadi arus utama (*mainstream*) dalam pembangunan ekonomi dengan tetap mengintegrasikannya dengan sektor daratan, sehingga kebijakan ini menjadi visi bersama bagi semua komponen bangsa yang berperan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi di

Indonesia. Dengan lahirnya *ocean policy* ini akan memberikan sebuah payung dan *guide line* bagi semua *stakeholders* yang memiliki konsen dengan sektor kelautan. Jadi, tidak ada lagi idiom bahwa bidang kelautan merupakan bagian dari sektor yang lain, tetapi bidang kelautan adalah sektor utama pembangunan ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan sektor yang lain. Pentingnya *ocean policy* dalam konteks global menurut Friedheim (2000) karena dampak dari perubahan politik dunia sejak tahun 1989 yang ditandai oleh globalisasi dimana terjadi perubahan cepat dalam bidang transportasi, komunikasi, interdependensi ekonomi, peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya alam dan spesies dunia serta berakhirnya perang dingin (dimana terjadi perlombaan senjata kimia, biologi dan nuklir) dan pada akhirnya memunculkan suatu kesadaran lingkungan di seluruh masyarakat dunia. Oleh karena Kebijakan pemerintah membentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (DKP) merupakan suatu keputusan ekonomi politik dari proses perubahan yang mendasar di tingkat kebijakan makro ekonomi nasional. Tetapi, keputusan politik tersebut, tidak hanya sampai pada pembentukan Kementerian tersebut, tetapi harus ada sebuah visi bersama pada semua level institusi negara yang dituangkan dalam kebijakan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan kelautan (*ocean policy*) dan implikasinya secara ekonomi adalah bidang kelautan akhirnya menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Inilah yang kemudian menjadi tugas besar dari semua komponen bangsa untuk menjawab problem struktural bangsa yakni kemiskinan, keterbelakangan dan ketergantungan terhadap negara maju yakni bertambahnya jumlah utang yang di bebankan kepada rakyat (Kusumastanto, 2002).

Dalam menjabarkan *Ocean Policy* menjadi sebuah *mainstream* pembangunan ekonomi, maka harus dikembangkan dalam kerangka pemikiran ekonomi yang disebut sebagai **OCEAN ECONOMICS (OCEANOMICS)**. Kusumastanto (2002) mendefinisikan *Oceanomics* sebagai ilmu serta pemikiran ekonomi dalam mendayagunakan fungsi dan sumberdaya kelautan secara bijaksana didukung oleh pilar-pilar ekonomi berbasis daratan dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Colgan (2003) mendefinisikan ekonomi kelautan menjadi dua kelompok yaitu ekonomi kelautan (*ocean economics*) sendiri dan ekonomi pesisir (*coastal economic*). Konsep ekonomi pesisir terdiri dari semua aktivitas ekonomi di wilayah pesisir yang berkaitan dengan aspek

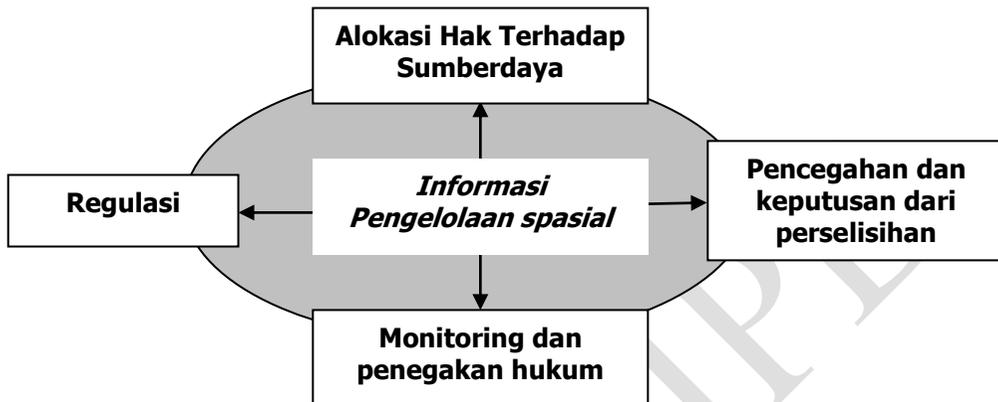
ketenagakerjaan, buangan limbah, dan *output* di wilayah tersebut. Beberapa aktivitas dari ekonomi pesisir merupakan bagian dari ekonomi kelautan. Sementara ekonomi kelautan merupakan semua aktivitas yang berasal dari sebagian atau seluruh *input* yang berasal dari lautan. Definisi dari ekonomi kelautan ini merupakan suatu fungsi dari aktivitas industri dan geografi. Sebagian besar dari aktivitas ekonomi kelautan berada di wilayah pesisir sedangkan sebagian lagi luar wilayah pesisir seperti pembangunan perahu (*boat building*) dan restoran *sea food*.

Sementara falsafah terminologi *Oceanomics* menjadi signifikan karena keterbukaan dalam perekonomian dunia. Artinya, terminologi ini tidak mengesampingkan paham *archipelago* (wawasan nusantara) yang sudah dicanangkan sejak deklarasi Djuanda, tetapi antara paham *archipelago* dan *ocean* dua hal yang harus saling memperkuat. Oleh karena paham *oceanic* lebih berorientasi ke luar dan *arcchipelago* menggambarkan paham wawasan nusantara.

Sebagai negara kepulauan dan banyaknya institusi yang berkepentingan dengan laut, maka Indonesia perlu merumuskan aransemen kelembagaan yang menata pembangunan kelautan. Nichols dan Monahan (2003) menyarankan agar menciptakan aransemen kelembagaan (*institutional arrangement*) yang “menunjang” mekanisme kerja kebijakan kelautan yang disebutnya sebagai *ocean governance* (OG). Aspek yang tercakup dalam OG adalah:

1. Pengalokasikan masyarakat dan antar institusi negara dalam penggunaan hak, kepemilikan dan mengelola sumberdaya kelautan.
2. Pengaturan (*regulation*) hak pemanfaatan, kepemilikan dan mengelola sumberdaya kelautan.
3. Pengembangan suatu lembaga/institusi yang memiliki otoritas untuk memonitoring dan menegakan hukum dalam pengelolaan sumberdaya kelautan.
4. Penciptakan ketentuan yang efektif untuk mencegah konflik pemanfaatan sumberdaya kelautan, baik oleh masyarakat maupun antar institusi negara.

Indonesia sangat memerlukan *ocean policy* maupun *ocean governance* karena Indonesia adalah negara kepulauan dan beragamnya institusi negara yang mengurus kelautan. Secara skematis prinsip kerja *Ocean Governance* disajikan pada Gambar 1.

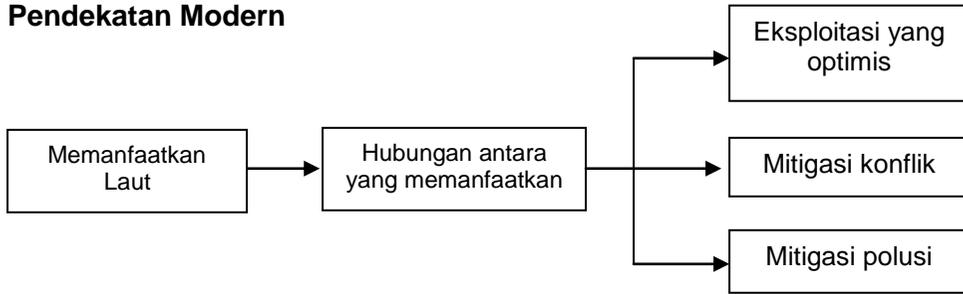


Gambar 1. Fungsi pemerintahan dalam kerangka *Ocean Governance* (Sumber: Nichols and Sutherland 2003).

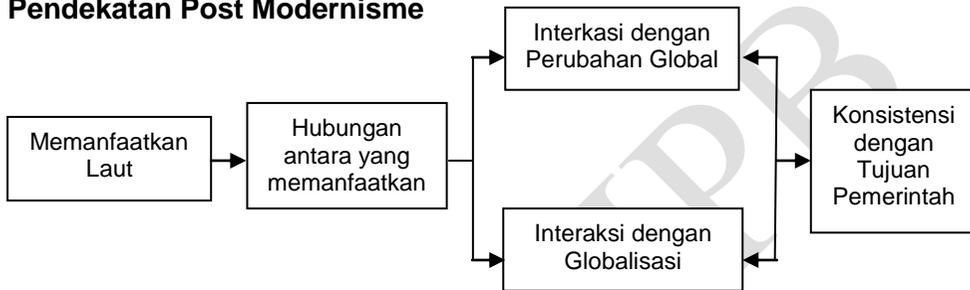
Vallega (2001) menggambarkan bahwa *Ocean Governance* mengalami perubahan pendekatan dari pendekatan modern menjadi ke arah yang *post modernism*. Pendekatan modern mengarah pada pemanfaatan laut untuk (i) eksploitasi yang optimis; (ii) mitigasi konflik; dan (iii) mitigasi polusi.

Sementara pendekatan post modernism pemanfaatan laut yang dipengaruhi oleh perubahan global yakni (i) interaksi dalam perubahan global; dan (ii) interkasi dengan globalisasi itu sendiri, sehingga pendekatan ini mengarah pada konsistensi dari tujuan yang hendak dicapai pemerintah. Skema kedua pendekatan tersebut disajikan pada Gambar 2.

Pendekatan Modern



Pendekatan Post Modernisme



Gambar 2. Perubahan Pendekatan *Ocean Governance* dari visi modernisme menuju visi post Modernisme (Sumber: Vallega 2001).

Komponen, faktor dan perwujudan spasial dari *ocean governance*(OG) disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Komponen, Faktor dan Perwujudan Spasial dari Ocean Governance

Komponen dan Faktor	Perwujudan Spasial dari OG		
	PP	PLD	PLSR
Komponen Hidrografi			
• Lautan (<i>Ocean</i>)		⊖	⊖
• Perairan Pedalaman (<i>Marginal seas</i>)	⊖		⊖
• Perairan Semi Tertutup (<i>Semi-Enclosed seas</i>)	⊖		⊖
• Perairan tertutup (<i>Enclosed seas</i>)	⊖		⊖
• Perairan kepulauan (<i>Archipelagic seas</i>)	⊖	⊖	⊖
Komponen Abiotik Ekosistem Laut			
• Batas Kontinental (<i>Continental margin</i>)	⊖		⊖
• Lautan Dalam (<i>Deep Ocean</i>)		⊖	⊖
Komponen Legal dan Yurisdiksi			
• Ruang daratan nasional (<i>Land national space</i>)	⊖		
• Perairan internal (<i>Internal water</i>)	⊖		
• Zona yurisdiksi nasional (<i>National jurisdictional zones</i>)	⊖	⊖	
• Kekayaan perairan dalam (<i>Deep seabed</i>)		⊖	⊖
Rejim Pengelolaan			
• Kedaulatan Negara (<i>State's sovereignty</i>)	⊖		
• Pengelolaan Prerogatif negara (<i>State's management prerogatives</i>)	⊖		
• Eksploitasi Bebas (<i>Free exploitation</i>)		⊖	⊖
• Internasional (<i>International</i>)		⊖	⊖
Dimensi Etika yang relevan			
• Rejim Kepemilikan Negara (<i>State property regime</i>)	⊖		
• <i>Res nullius</i>		⊖	⊖
• <i>Patrimony of mankind</i>		⊖	

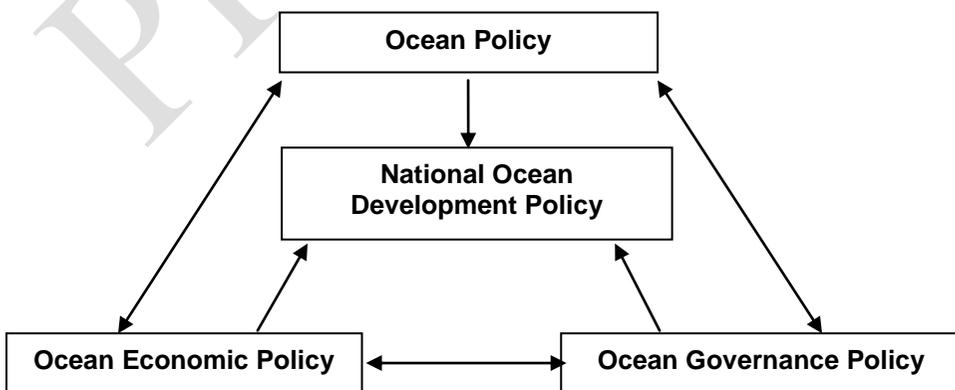
Keterangan: PP = Pengelolaan Pesisir, PLD = Pengelolaan Laut Dalam, PLSR = Pengelolaan Laut Secara Regional,

Sumber : Vallega (2001)

Patut dicermati bahwa perubahan global jangan sampai mengorbankan rakyat akibat eksploitasi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Oleh karenanya *Ocean Policy*, *Ocean Economic Policy*, dan *Ocean Governance Policy* penting bagi Indonesia untuk membangun kekuatan ekonomi rakyat kepulauan yang berbasiskan ekonomi kelautan lokal (*Local Ocean Economics*)

yang mampu bersaing di pasar global. Dengan demikian tidak menciptakan ketergantungan ekonomi pada negara-negara maju yang berwujud utang luar negeri, maupun ketergantungan pada kekuatan pemilik modal lokal yang berkolaborasi dengan kekuasaan sehingga berujung pada kehancuran sumberdaya alam laut, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan masyarakat pesisir. Oleh karena itu dalam *Ocean governance* tiga agenda besar yang harus dituntaskan adalah (i) meminimalisasi eksploitasi sumberdaya kelautan secara berlebihan; (ii) mengupayakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan lingkungan laut secara berkelanjutan; dan (iii) memanfaatkan sumberdaya kelautan secara berkeadilan untuk menciptakan kesejahteraan tanpa penindasan yang akhirnya melanggengkan kemiskinan.

Secara komprehensif visi *Ocean Policy*, *Ocean Economic Policy* dan *Ocean Governance Policy* harus dibangun dalam kerangka Wawasan Nusantara guna menunjang implementasi otonomi daerah yang terintegrasi dalam pembangunan nasional. Wawasan Nusantara adalah sebuah keputusan politik yang memayungi keutuhan wilayah nusantara atas matra laut, darat dan udara. Sedangkan otonomi daerah adalah keputusan politik juga yang diharapkan mampu menciptakan kemajuan daerah serta mensejahterakan rakyat. Pembangunan kelautan harus dikembangkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga keutuhan wilayah nasional maupun kebhinekaan tetap terjamin. Secara skematik visi *ocean policy*, *ocean economics* dan *ocean governance* disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Tiga Pilar Pembangunan Kelautan Nasional.

Berdasarkan uraian dan Gambar 3, maka formulasi kebijakan pembangunan kelautan nasional seharusnya dikembangkan dalam tiga pilar tersebut. Ketiga pilar dengan Ocean Policy sebagai pilar utama harus menjadi “roh” untuk merumuskan dan memformulasikan “*blue print*” pembangunan kelautan, yang akan dilaksanakan oleh Presiden dibantu para Menteri terkait. Dengan *blue print* itu diharapkan pembangunan mempunyai arah dan kebijakan yang jelas mulai dari level pemerintahan pusat sampai daerah. *Blue print* ini akan menjadi *frame* bersama bagi daerah-daerah untuk merumuskan sendiri kebijakan pembangunan kelautan daerahnya dalam konteks otonomi dan desentralisasi. Dengan demikian, pembangunan kelautan berjalan secara sinergis, koordinatif dan terintegrasi dari kabupaten/kota, propinsi maupun nasional.

Proses reformasi politik yang dimulai sejak tahun 1998 telah melahirkan perubahan-perubahan yang signifikan dalam pembangunan demokrasi di tanah air. Secara internal bangsa Indonesia mengalami perubahan dalam politik dan kebijakan pembangunan ekonomi. Dalam proses politik pemerintah telah melakukan perubahan-perubahan dalam proses PEMILU, Amendemen UU 1945, dan meningkatnya peran daerah dalam proses pengambilan keputusan politik yakni diberlakukannya otonomi daerah. Namun demikian pada saat yang sama secara eksternal, di tingkat global telah terjadi perubahan konstalasi politik dan ekonomi dunia yang melahirkan dua kutub pergesekan ideologis. Di satu sisi mengedepankan neo-liberalisme sebagai bentuk hegemoni globalisasi yang menginginkan dunia tanpa batas yang diprakarsai negara-negara maju. Proses hegemoni tersebut dilakukan melalui liberalisasi perdagangan. Sementara di sisi lain, masyarakat dunia yang menentang neo-liberalisme khususnya dimotori negara-negara dunia ketiga yang banyak menderita akibat dirugikan oleh globalisasi. Penderitaan tersebut adalah kemiskinan, kehancuran sumberdaya alam, termasuk kelautan, hutan, pertambangan dan air serta kehancuran modal sosial (nilai-nilai budaya masyarakat lokal).

Perkembangan reformasi ekonomi maupun politik di Indonesia tidak luput dari dampak kedua perubahan internal maupun eksternal tersebut. Khususnya dalam pembangunan ekonomi, Indonesia dituntut menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang memiliki daya saing global jangka

pendek maupun jangka panjang. Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru tersebut adalah bidang kelautan yang selama kurun waktu setengah abad kurang mendapatkan perhatian yang serius. Kelautan yang meliputi perhubungan laut, perikanan, pariwisata bahari, pertambangan, industri maritim, bangunan kelautan dan jasa kelautan harus disiapkan sebagai masa depan bangsa karena laut adalah 2/3 wilayah nusantara. Peran dan pertumbuhan ekonomi bidang kelautan cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia yaitu pada tahun 1998 memberikan kontribusi 20,06% yang merupakan urutan kedua setelah Jasa-jasa 41,12% sedangkan yang lain seperti Manufaktur 19,92%, pertanian 12,62% dan pertambangan dan penggalian 4,21% (Kusumastanto, 2003). Dengan dukungan yang terbatas kelautan telah memberikan kontribusi yang signifikan sehingga dalam rangka meningkatkan kemampuan kelautan sebagai tulang punggung perekonomian nasional kebijakan-kebijakan sebelumnya yang sifatnya sektoral harus dihilangkan karena laut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi sehingga diperlukan kebijakan pembangunan kelautan yang kuat.

Pada tahun 1999, pemerintah mulai memperhatikan kelautan dengan terpilihnya Abdurahman Wahid sebagai Presiden RI yang dalam kabinetnya membentuk Kementerian Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP), kemudian menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (DKP) dan sekarang Kementerian Kelautan dan Perikanan disamping Kementerian yang terkait langsung dengan aktivitas kelautan seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Budaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagainya. Perjalanan pembangunan kelautan dalam kurun waktu 1999-2009, setidaknya telah memberikan dampak positif terhadap dua hal, *pertama*, adanya perubahan paradigma berpikir masyarakat Indonesia bahwa Indonesia memiliki sumberdaya kelautan yang besar dan apabila dikelola dengan baik maka dapat menjadi kekuatan dalam pembangunan ekonomi Indonesia; *kedua*, munculnya kesadaran yang lebih baik bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil sehingga dalam pengelolaan pembangunannya harus menekankan pada kesatuan ekonomi, politik dan wilayah yang ditentukan oleh kekuatan negara dalam menangani laut. Kesadaran tersebut menimbulkan kepedulian akan pentingnya Indonesia memperkuat pemahaman mengenai laut yang tentunya masih banyak belum dipahami. Sehingga berkembanglah

berbagai kajian yang semakin meluas seperti aspek ekonomi-politik, ekonomi wilayah, sosiologi masyarakat pesisir, kebijakan pembangunan kelautan, *engineering* kelautan dan ekonomi sumberdaya kelautan. Dengan demikian terjadi keterpaduan antara pembangunan ekonomi daratan (kontinental/terrestrial) dan lautan (*ocean*) dalam strategi pembangunan nasional sehingga untuk mensejahterakan dan rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka komitmen dan kesadaran dari semua pengambil kebijakan di negeri ini baik di level legislatif dan eksekutif maupun segenap komponen bangsa Indonesia tentang pentingnya bidang kelautan bagi masa depan bangsa.

Kebijakan pembangunan kelautan dan manajemen pembangunan kelautan haruslah merupakan keterpaduan antara sektor lautan dan daratan serta menyatu dalam strategi pembangunan nasional sehingga kekuatan darat dan laut dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan bangsa dan bukan saling mengkerdikan satu dengan lainnya. Kelautan (*ocean*) secara definisi adalah sebuah bidang ekonomi yang mencakup fungsi laut (ekonomi dan politik) serta sumberdaya kelautan yang diperbaharui maupun tak dapat diperbaharui termasuk sektor hulu dan hilirnya (jasa-jasa) yang mendukung berkembangnya bidang kelautan yang digunakan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat. Dalam klasifikasi tersebut dapat dikemukakan, *pertama*, sektor yang tak dapat diperbaharui seperti pertambangan laut dan mineral. *Kedua*, yang dapat diperbaharui seperti sumberdaya perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, dan sebagainya. *Ketiga*, sektor hulu dan hilir seperti transportasi laut, industri maritim, industri pertahanan, perdagangan antar pulau, pariwisata bahari dan perikanan rakyat maupun industri. *Keempat*, aspek pendukungnya seperti infrastruktur, bangunan kelautan dan pertahanan dan keamanan. Tentu sektor yang begitu kompleks membutuhkan keterkaitan dan sinergisasi antar berbagai institusi negara yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian akan menjadi “rancu” ketika ada pemahaman bahwa bidang kelautan merupakan bagian dari sektor lain dalam arti luas misalnya atau bagian sektor lainnya. Substansi kelautan yang multisektor dan kompleks tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kelautan memerlukan pendekatan yang sinergis dan terintegrasi baik secara vertikal pada level kebijakan maupun horizontal pada level implementasi.

Bidang kelautan Indonesia merupakan aktivitas ekonomi yang berada dipinggiran arus pembangunan ditinjau dari rendahnya tingkat pemanfaatan sumberdaya, teknologi, investasi, walaupun kontribusi ekonominya cukup tinggi, padahal banyak negara maju seperti Amerika, Jepang yang ekonominya sangat maju karena kuatnya kontribusi ekonomi kelautannya salah satunya melalui ekspor produk dan distribusi melalui laut. Dalam rangka pembangunan ekonomi nasional maka komitmen pemerintah terhadap kelautan sudah seharusnya ditingkatkan mengingat wilayah laut kita yang luas dan memiliki peluang dikembangkan bersama-sama dengan kegiatan ekonomi daratan. Dengan demikian maka pemerintah harus memiliki kebijakan kelautan yang kuat karena kelautan adalah multisektor maka keterkaitan dan koordinasi dengan institusi negara yang mengurus kelautan sangat menentukan. Pembangunan kelautan tersebut mengarah kepada keberpihakan pada pengembangan aktivitas ekonomi yang memanfaatkan fungsi laut dan sumberdaya kelautan sehingga implementasi kebijakannya harus mendorong pada kesejahteraan rakyat dan tidak diukur hanya dengan keragaan satu sektor namun juga didasarkan pada visi masa depan bangsa dan negara dalam menyikapi persaingan global. Visi tersebut menggaris bawahi bahwa bidang kelautan secara ekonomi-politik sebagai suatu kekuatan ekonomi yang mampu menuntaskan problem struktural bangsa.

Dalam rangka mengarah pada perspektif tersebut maka bagi semua institusi negara yang berperan dalam pengambil kebijakan harus memutuskan warisan masa lalu yang menjadi hambatan pembangunan kelautan. Warisan itu diantaranya adalah maraknya pemburu rente (*rent seeker*) di tingkat pusat maupun daerah yang sukar diputus “jaringannya”. Secara ekonomi jaringan ini dibangun melalui sistem yang monopolistik/oligopolistik secara integrasi vertikal, sedangkan secara politik dibangun atas komitmen-komitmen antara oknum yang berada dalam institusi Negara maupun kalangan pengusaha yang menimbulkan munculnya birokrasi rente. Pada masa lalu para pemburu rente ini leluasa mengeksploitasi sumberdaya kelautan dengan melakukan berbagai macam pelanggaran. Pemanfaatan ekonomi oleh pemburu rente yang semacam inilah tidak mudah di putus atau dihilangkan begitu saja sampai saat ini sebab mereka mempunyai jaringan yang sangat kuat, sehingga sebuah kementerian tidak bisa menuntaskan problem ekonomi politik tersebut memiliki karena akan berhadapan

dengan kekuatan-kekuatan yang memiliki jaringan yang kuat. Sehingga seluruh institusi negara memiliki komitmen yang sama untuk membangun pemerintahan kelautan (ocean governance) yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

6.2. Formulasi Pembangunan Kelautan Pusat dan Daerah

Semangat otonomi daerah yang tertuang dalam UU No 32 Tahun 2004, seharusnya tidak memisahkan laut justru laut menjadi perekat dan pemersatu bangsa Indonesia. Dengan demikian kewenangan yang diberikan bukan berarti membolehkan laut untuk dikapling oleh pusat maupun daerah (provinsi maupun kabupaten) karena karakteristik laut sebagai *large based ecosystem* memerlukan keterpaduan dalam pengelolaan dan pembangunan. Salah satu amanat yang terkandung dalam UU No. 33 Tahun 2004 adalah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam penjelasan UU tersebut disebutkan bahwa perimbangan keuangan antar pusat dan daerah untuk sumberdaya kelautan yakni 80% : 20%. Perimbangan yang diperoleh daerah tersebut dibagi rata oleh semua daerah tersebut dalam suatu provinsi. Persoalannya adalah bagaimana kalau dalam suatu provinsi terdapat daerah yang sama sekali tidak memiliki sumberdaya kelautan?. Secara hukum daerah tersebut berhak mendapatkan pembagian pendapatan dari sumberdaya kelautan tersebut, karena itu adalah ketentuan perundangan. Tetapi, menjadi sebuah kerancuan karena apabila daerah tersebut sama sekali tidak mempunyai wilayah laut tapi menerima jumlah yang sama. Disinilah perlunya sebuah kebijakan perimbangan pusat dan daerah untuk pembangunan kelautan. Formulasi kebijakan yang dimaksudkan adalah bagaimana kebijakan tersebut mampu menciptakan “redistribusi keadilan” antar daerah yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dengan daerah sama sekali yang tidak memilikinya. Redistribusi pendapatan dari sumberdaya kelautan tersebut harus dirumuskan dalam sebuah formulasi kebijakan dengan cara membuat rasio pendapatan daerah dari semua sektor pembangunan. Dengan demikian, perimbangan keuangan daerah untuk pembangunan kelautan tidak mubazir dan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pembangunan daerah yang memiliki sumberdaya kelautan. Sementara daerah yang tidak memiliki sumberdaya kelautan akan menjadi *supporting system* dalam perencanaan

pembangunan secara regional. Di sinilah adanya keterkaitan regional maupun sektoral antar daerah, antar sektor pembangunan dan wilayah.

Kebijakan alokasi dalam pembiayaan merupakan hal yang penting dalam memajukan pembangunan kelautan. Selama ini pembiayaan kelautan dialokasikan untuk sektor secara tersebar tanpa adanya arah yang jelas mengenai keterkaitan antar sektor. Pemerintah tidak pernah menghitung alokasi pembangunan kelautan secara agregat yang mencakup tujuh sektor kelautan yakni transportasi laut, perikanan, industri kelautan (*marine industry*), pariwisata bahari, bangunan kelautan, pertambangan laut, dan jasa kelautan. Akibatnya, dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencakup anggaran rutin dan anggaran pembangunan alokasi bidang kelautan secara agregat tidak menggambarkan keterkaitan antar sektor, hal yang sama terjadi juga dalam PDB nasional. Sehingga yang dihitung pemerintah sebagai representasi sektor kelautan hanya PDB sektor perikanan, keadaan tersebut menggambarkan ketidakpahaman pemerintah terhadap karakteristik kelautan. Dengan demikian maka penganggaran maupun pendataan statistik kelautan harus disesuaikan dengan kebijakan kelautan yang mencakup multisektor sehingga terdapat keterpaduan dalam perencanaan pembangunan.

Ditinjau dari sumbernya sampai saat ini bangsa Indonesia masih memiliki ketergantungan pada pinjaman luar negeri tanpa ada skenario kapan bantuan tersebut akan berakhir. Ketergantungan pada bantuan luar negeri dalam pembangunan kelautan dikaji kembali yang bertujuan agar mengarahkan anggaran yang mampu menopang keberlanjutan program dan langsung *sustainable financing*, peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya rakyat kecil serta pada peningkatan kualitas lingkungan dan sumberdaya dan kejelasan mengenai kekuatan sendiri tanpa bantuan asing. Pada saat ini yang terpenting adalah bagaimana “mengurangi” ketergantungan pada bantuan luar negeri dan membangkitkan kemampuan masyarakat lokal terutama di daerah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi produktif yang bertumpu pada sumberdaya kelautan. Dengan demikian kita bangsa Indonesia dapat keluar dari kondisi krisis ekonomi sekaligus dari ketergantungan kepada berbagai donor dengan efisiensi penggunaan dana dan membangkitkan kemampuan sendiri secepatnya.

6.3. Aransemen Kelembagaan dalam Tatakelola Kelautan

Saat ini arah kebijakan pembangunan kelautan masih berjalan sendiri-sendiri. Semua institusi negara yang berkepentingan dengan laut membuat kebijakan lebih bersifat sektoral. Belum ada suatu mekanisme atau aransemen kelembagaan yang mampu mensinergikan dan memadukan kebijakan pembangunan kelautan. Dampaknya, penanganan suatu kasus dalam pembangunan kelautan acapkali menimbulkan konflik kepentingan ketimbang solusi integral. Umpamanya, penyelesaian kasus pasir laut Riau yang menimbulkan problem antar institusi negara yakni antara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari kasus ini nampak jelas bahwa pembangunan kelautan memang membutuhkan mekanisme koordinasi dan aransemen kelembagaan yang mampu memadukan semua kepentingan institusi negara yang terlibat. Tabel 5. berikut ini menunjukkan institusi-institusi negara yang berkaitan dengan pembangunan kelautan.

Tabel 5. Institusi-institusi Negara yang berkaitan dengan Kelautan

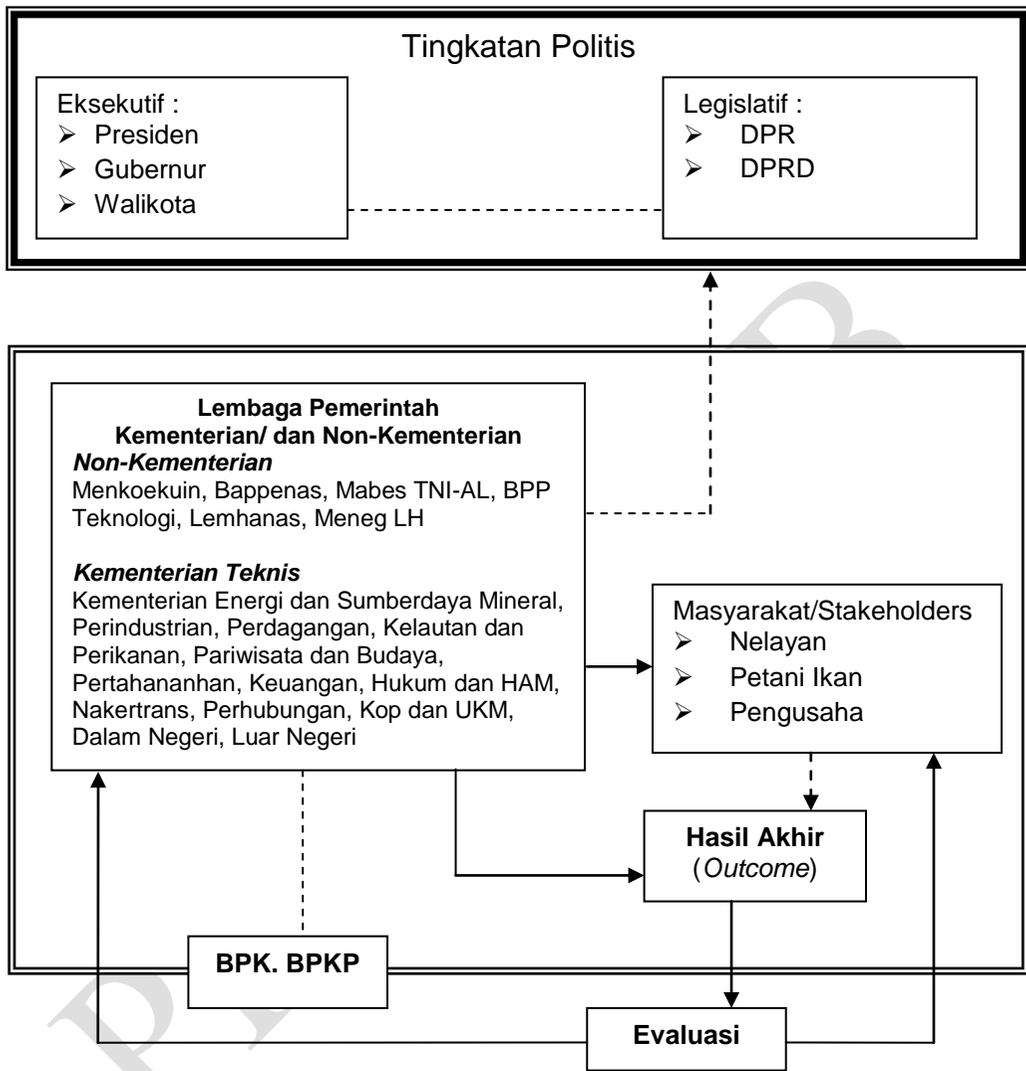
No.	Institusi Negara	Kewenangan/Tanggungjawab	Cakupan Teritorial Laut
1	Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral	<ul style="list-style-type: none">• Pertambangan Minyak dan Gas lepas pantai• Pertambangan Mineral dan golongan C di pantai dan lepas pantai	<ul style="list-style-type: none">• Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil• Perairan lepas pantai
2	Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none">• Transportasi Laut• Kepelabuhanan Syahbandar• SDM Kepelautan	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh wilayah laut dan sungai
3	Kementerian Negara Pariwisata Seni dan Budaya	<ul style="list-style-type: none">• Wisata Bahari (diving, snorkeling, atraksi laut, surfing, dll)	<ul style="list-style-type: none">• Perairan pesisir dan pulau-pulau kecil
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">• Perikanan tangkap• Perikanan budidaya (laut dan darat)• Aransemen kelembagaan perikanan (hukum-hukum perikanan nasional)• Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none">• Perairan pantai• Perairan lepas pantai• Perairan ZEEI• Perairan terrestrial/tawar
5	Kementerian Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none">• Wilayah perbatasan NKRI• Ratifikasi hukum-hukum laut	<ul style="list-style-type: none">• Laut teritorial• Perairan ZEEI

No.	Institusi Negara	Kewenangan/Tanggungjawab	Cakupan Teritorial Laut
		internasional <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pelayaran internasional • Perbatasan dengan negara tetangga 	<ul style="list-style-type: none"> • Alur laut kepulauan Indonesia (ALKI)
6	Kementerian Pertahanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pertahanan di wilayah laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh wilayah laut
7	TNI – AL	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan wilayah laut dan wilayah perbatasan NKRI • Patrol dan Penegakkan hukum di laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh perairan Indonesia termasuk ZEEI
8	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi otonomi daerah di wilayah laut • Penataan aransemen kelembagaan otda di daerah • Penataan ulang masalah perbatasan daerah di wilayah laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah laut • Provinsi yang memiliki wilayah laut
9	Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan pembiayaan pembangunan kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh wilayah laut
10	Kementerian Negara Koperasi dan PPK	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan Pengembangan UKM-UKM kelautan • Penyusunan kebijakan kredit mikro 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat pesisir dan rakyat di pulau kecil (nelayan, pembudidaya ikan, petambak, kalangan UKM kelautan)
11	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan kajian-kajian sumberdaya kelautan • Kajian pengembangan teknologi dan bioteknologi kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perairan pantai • Perairan lepas pantai
12	Kementerian Kehakiman dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan penataan hukum-hukum kelautan • Penyidikan, penyelidikan hukum di laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Perairan teritorial • Perairan ZEEI
13	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dan penghormatan hak-hak tenaga kerja kelautan (buruh pelabuhan, dan tenaga di kapal ikan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh wilayah laut
14	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • AMDAL pesisir dan pulau-pulau kecil • Perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan pesisir, laut dan pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Perairan pesisir termasuk muara sungai • Perairan laut nasional
15	Menko Ekuin	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan institusi negara dalam bidang kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh wilayah negara
16	Bappenas	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pembangunan nasional lintas sektoral, maupun institusi negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh wilayah negara
17	Kepolisian RI (Polairud)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyidik, penyelidikan, keamanan di laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Perairan pantai

Sumber: Kusumastanto, 2003

Berdasarkan pada Tabel 5, menunjukkan bahwa tanggung jawab/kewenangan pembangunan kelautan melibatkan berbagai pihak. Tidak mungkin pembangunan kelautan tersebut hanya akan dapat dilakukan oleh sebuah institusi negara yang kewenangannya terbatas atau derajat institusionalnya sejajar dengan lembaga negara yang lainnya.

Agar bidang kelautan menjadi sebuah bidang unggulan dalam perekonomian nasional, maka diperlukan suatu kebijakan pembangunan yang bersifat terintegrasi antar institusi pemerintah dan sektor pembangunan. Guna mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan sebuah kebijakan pembangunan kelautan nasional (*National Ocean development policy*) yang nantinya menjadi “payung” dalam mengambil sebuah kebijakan yang bersifat public. Penciptaan payung ini dibangun oleh sebuah pendekatan kelembagaan (*institutional arrangement*) yang lingkupnya mencakup dua dominan dalam suatu system pemerintahan yakni eksekutif dan legislative. Dalam konteks itu, maka kebijakan kelautan dan perikanan pada akhirnya menjadi kebijakan ekonomi politik yang nantinya menjadi tanggung jawab bersama pada semua level institusi eksekutif dan legislative yang mempunyai keterkaitan kelembagaan maupun sektor pembangunan. Sementara pada level legislatif adalah bagaimana lembaga ini mampu menciptakan instrumen kelembagaan (peraturan perundangan) pada level pusat maupun daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan kelautan. Secara skematis model alur kebijakan pembangunan kelautan yang dimaksud dijelaskan pada Gambar 4 berikut :



Keterangan :

- ➔ Alur Kebijakan
- - - - -➔ Pola interaksi
- - - - - Implikasi

Gambar 4. Model Alur Kebijakan Pembangunan Kelautan dalam Tatakelola Kelautan.

Berdasarkan pada Gambar 4, perumusan kebijakan pembangunan kelautan akan melingkupi tiga tingkatan (1) tingkatan politis (kebijakan), (2) tingkatan organisasi/implementasi (institusi, aturan main), dan (3) tingkatan implementasi (evaluasi, umpan balik). Aplikasi atau simplifikasi model hierarkis ini dalam konteks kebijakan pembangunan kelautan dijelaskan sebagai berikut. Pada tingkat politis terdapat lembaga tinggi negara dan atau lembaga legislative, sedangkan pada tingkat organisasi ditempati oleh lembaga-lembaga Kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian serta non-Kementerian yang memiliki wilayah yang sama dengan sektor kelautan. Dengan demikian pada level ini terdapat hubungan antara lembaga pemerintah (*intergovernment organization, IGO*) yang bersifat koordinatif, dan saling mendukung. Sedangkan, pada tingkat implementasi terdapat nelayan dan petani ikan, kalangan pengusaha dan sebagainya yang berperan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang kelautan.

Dalam konteks kekinian, gagasan semacam ini belum berkembang dalam merumuskan pembangunan kelautan nasional. Hal ini dibuktikan dengan munculnya beberapa isu yang bersifat multi-dimensi, multi-sektoral dan memiliki keterkaitan antar organisasi pemerintahan (antar Kementerian maupun lembaga non-Kementerian), sehingga proses penyelesaiannya menjadi rumit. Isu-isu tersebut disajikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Isu-Isu Pokok Pembangunan Kelautan

No	Isu Pokok	Problem	Keterkaitan Sektoral	Keterkaitan Lembaga
1	Pasir Laut Pertambahan Laut	<ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan lingkungan • Eksploitasi ilegal • Berkurangnya mata pencaharian nelayan • Konflik kepentingan pusat dan daerah • Adanya indikasi KKN 	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor Pertambangan • Lingkungan Hidup • Perindag • Hankam • Kehakiman/ Legal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Mineral • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Deperindag • TNI – AL • Meneg Lingkungan Hidup
2	Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> • Pencurian ikan oleh kapal asing • Pengawasan yang lemah • Konflik nelayan tradisional dengan nelayan modern/asing 	<ul style="list-style-type: none"> • Keamanan • Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Hukum dan HAM • Kementerian Kelautan dan Perikanan • TNI – AL
3	Pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Isu terancamnya tenggelamnya pulau sebanyak 4000 pulau pada tahun 2012 	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan hidup • Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Meneg Lingkungan Hidup

No	Isu Pokok	Problem	Keterkaitan Sektoral	Keterkaitan Lembaga
		<ul style="list-style-type: none"> Kerusakan ekosistem 	<ul style="list-style-type: none"> Pemukiman/ infrastruktur Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> BPP Teknologi Meneg Pariwisata, Seni dan Budaya
4	Pariwisata Bahari	<ul style="list-style-type: none"> Kerusakan habitat terumbu karang Indonesia yang mencapai sekitar 70% dengan estimasi kerugian mencapai US\$ 45 juta/th Rusaknya sebagian besar hutan mangrove di seluruh wilayah pesisir Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Pariwisata Transportasi Perindustrian Kehutanan Lingkungan Infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> Meneg Pariwisata, Seni dan Budaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perhubungan Deperindag Dephut Meneg Lingkungan Hidup
5	Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> Matinya udang di beberapa kawasan perikanan di Jawa yang disebabkan oleh penyakit virus 	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan Perikanan Industri 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Kementerian Kelautan dan Perikanan
6	Pelabuhan Umum dan Perikanan dan Lemahnya Armada Laut Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Pendagkalan pada beberapa pelabuhan tradisional di Indonesia Belum terdesentralisasinya perizinan pelabuhan Daya saing angkutan laut nasional rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan Transportasi Laut Infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perhubungan Kementerian Kimpraswil
7	Embargo Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya ancaman Embargo produk perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan Perindustrian Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Luar Negeri Kementerian Perindustrian dan Perdagangan
8	Sumberdaya Manusia Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya laut Rendahnya daya saing pelaut Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan Tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pendidikan Nasional/Universitas Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Tenaga Kerja
9	Degradasi Lingkungan Pesisir dan Laut	<ul style="list-style-type: none"> Terjadinya pencemaran sumberdaya hayati laut oleh logam berat dan buangan limbah yang menghancurkan industri pertambakan Terjadinya abrasi pantai di beberapa daerah di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Lingkungan Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kelautan dan Perikanan Menteri Negara Lingkungan Hidup
10	Keamanan Laut	<ul style="list-style-type: none"> Nelayan merasa tidak aman dalam melakukan penangkapan ikan di laut Perusahaan merasa tidak aman dalam mengangkut barangnya di laut 	<ul style="list-style-type: none"> Pertahanan Keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> Dephankam Polairud TNI – AL Kementerian Kelautan dan Perikanan
11	Kelembagaan (Retribusi Hasil Perikanan)	<ul style="list-style-type: none"> Ketidakjelasan kewenangan untuk memungut retribusi hasil perikanan dalam era otonomi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi

No	Isu Pokok	Problem	Keterkaitan Sektoral	Keterkaitan Lembaga
12	Pelanggaran HAM	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan tenaga anak-anak dalam bisnis kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> Ketenagakerjaan Pendidikan Perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKP DepKehakiman dan HAM Depperindag
13	Reklamasi	<ul style="list-style-type: none"> Pengrusakan nelayan, rusaknya ekosistem, banjir dan pencemaran 	<ul style="list-style-type: none"> Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Meneg LH Pemda DKI Jakarta DKP
14	Pulau-pulau Kecil Perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> Terancam lepas Masalah perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> Pertahanan Keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> Deplu Dephan, TNI-AL DKP
15	Utang Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah utang LN untuk pembangunan kelautan meningkat Peluang terjadinya korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> Keuangan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> DKP Menkoeku Depkeu Bappenas
16	UMKM Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya komitmen pada ekonomi rakyat Mekanisme pengelolaan dan pengalokasian 	<ul style="list-style-type: none"> Usaha kecil menengah Usaha mikro Perikanan dan kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> DKP Bank Indonesia, Bank pelaksana Meneg Koperasi dan PPK
17	Pungutan Liar	<ul style="list-style-type: none"> Pungutan Serikat pekerja informal Pungutan oleh instansi pemerintah yang tak resmi (retribusi ganda) Pungutan oleh oknum keamanan di laut Pungutan oleh oknum pelabuhan Pungutan oleh oknum keamanan di perairan lepas Biaya non-bujet kunjungan pejabat ke lokasi proyek 	<ul style="list-style-type: none"> Perikanan dan kelautan Keamanan laut Perhubungan laut Kepelabuhanan Pengawasan keuangan negara 	<ul style="list-style-type: none"> DKP TNI-AL Polairud Administrasi Kepelabuhanan BPKP Kepolisian RI
18	Transmigrasi Nelayan ke pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> Populasi nelayan di Jawa meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> Transmigrasi Kependudukan Kelautan dan Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Depnakertrans DKP
19	Tertundanya kredit untuk UKM kelautan	<ul style="list-style-type: none"> UKM kelautan belum teridentifikasi Perlunya jaminan dari perbankan Daya serap UKM kelautan belum jelas 	<ul style="list-style-type: none"> Usaha mikro dan UKM Perbankan 	<ul style="list-style-type: none"> DKP BI dan Bank Pelaksana Depkop dan PPK

Sumber: Diolah dari berbagai Sumber.

Merujuk dari isu dan problem semacam ini, maka kebijakan sebagaimana dimaksud menjadi signifikan dalam memayungi pembangunan

kelautan. Dalam hal ini, eksekutif dan legislatif masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing dan dapat bekerja secara sistematis dan terintegrasi.

Untuk mengembangkan suatu kebijakan kelautan (*ocean policy*), maka diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu, *pertama*, kebijakan tersebut harus memiliki instrumen yang efektif untuk menjalankannya (*policy tools*). Instrumen tersebut sebaiknya (i) dapat diaplikasikan (*applicability*) secara leluasa (*discretionary*) dan universal serta dapat ditegakkan secara hukum (*enforceability*); dan (ii) memiliki kewenangan administratif (*right of administrative authorities*) yang mencakup aspek insentif dan regulatif. *Kedua*, kebijakan tersebut dapat memberikan dampak terhadap perekonomian domestik maupun global. Artinya kebijakan itu mendapatkan dukungan/konsensus secara nasional (khususnya di level pemerintah dan legislatif) maupun internasional. *Ketiga*, kebijakan tersebut harus efisien dan efektif atau *cost effective* secara ekonomi dan adil (*fairness*), sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Keempat, kebijakan harus mampu mendorong kemandirian rakyat dan berlandaskan nilai-nilai luhur agama dan moralitas.

Agar supaya persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka diperlukan ; (1) pendekatan pasar (*market based approaches*) yang di dukung oleh instrumen kebijakan yang diterapkan misalnya pajak, pungutan (*charge*), sanksi dan insentif serta disinsentif, namun tetap melindungi kepentingan nasional (2) pendekatan kelembagaan (*institutional approaches*). Kebijakan kelautan tersebut mampu memberikan perlindungan dan pembatasan akses terhadap sumberdaya, adanya hak kepemilikan (*property right*), dan adanya peraturan perundangan yang mendukungnya. Aturan yang ditetapkan dalam pendekatan ini harus dikenal dan diikuti secara baik seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan memberi naungan dan konstrain terhadap mereka. Aturan ini ditulis secara formal dan ditegakkan oleh aparat pemerintah, atau tidak ditulis formal sampai pada aturan adat dan norma masyarakat serta kearifan lokal (*local wisdom*). Aspek penting lainnya dari aturan tersebut adalah dapat diprediksi (*predictable*), *essentially stable* dan dapat diaplikasikan pada situasi berulang, dan (3) Pendekatan pencampuran pasar (*mixed market*) dan bukan pasar (*non-market*) serta pendekatan kelembagaan yang efektif dan efisien. Dengan

demikian sumberdaya kelautan akan dinilai secara wajar (fair) dan tidak undervalue, sehingga pembangunan kelautan melakukan penilaian (valuasi) secara benar agar dicapai kesejahteraan yang hakiki bagi masyarakat Indonesia serta pembangunan bersifat lestari. Dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan kelautan yang efektif dan efisien maka diperlukan Kebijakan Tatakelola Kelautan (*Ocean Governance Policy*) yakni kebijakan dalam aransemen dan penataan kelembagaan yang mampu mensinergikan dan mengkoordinasikan antar institusi negara maupun sektor pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan pendayagunaan fungsi laut dan sumberdaya kelautan, termasuk peningkatan peran serta kewenangan daerah dan hubungan antar pusat-daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dalam konteks otonomi daerah. Kebijakan tersebut juga mencakup peran negara dalam manajemen pembangunan kelautan dan pengelolaan sumberdaya kelautan yang meliputi aspek perencanaan, aspek pengorganisasian, aspek implementasi, aspek pengawasan, penegakkan hukum dan pertahanan keamanan di laut. Agar manajemen pembangunan kelautan tersebut dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan kepemimpinan nasional dan daerah yang memiliki visi, komitmen politik, mampu menegakan *clean government and good governance* serta didukung birokrasi yang profesional, bersih dan berwibawa. Dengan langkah tersebut maka pembangunan kelautan akan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan dalam membangun perekonomian nasional, demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mensejahterakan segenap rakyat Indonesia.

7. PENUTUP

Kelautan sebagai sebuah bidang ekonomi yang terdiri dari dari beberapa sektor memiliki potensi yang besar dalam pembangunan bangsa dan Negara. Potensi ekonomi yang besar tersebut harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan kelautan perlu melakukan transformasi pemikiran, kebijakan dan implementasi yang dapat menjamin bahwa laut berfungsi sebagai pemersatu wilayah, politik dan ekonomi

serta mampu memberikan kontribusi yang signifikan peningkatan kesejahteraan bangsa. Dalam mencapai tujuan tersebut peran Kebijakan Kelautan (ocean policy) sebagai pilar utama didukung oleh Kebijakan Ekonomi Kelautan (Ocean Economic Policy) dan Kebijakan Tatakelola Kelautan (Ocean Governance Policy) sangat menentukan dalam memberikan arah dan acuan bagi segenap stakeholder dalam pembangunan kelautan nasional. Karakteristik kelautan yang multisektor memerlukan keterpaduan dalam pengelolaan karena menyangkut kewenangan beberapa institusi sehingga tatakelola kelautan (ocean governance) sangat menentukan terbangunnya koordinasi antar lembaga dan stakeholder kelautan dalam rangka pembangunan kelautan. Aransemen kelembagaan kelautan mendesak untuk segera dilakukan agar sinergi dalam pembangunan kelautan dapat diwujudkan karena tumpang tindih kewenangan dapat diminimumkan sehingga terjadi penguatan dari pelaksanaan program kelautan yang dilaksanakan oleh setiap stakeholder. Diharapkan dengan adanya tatakelola yang baik maka koordinasi pembangunan kelautan dapat dikembangkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

DAFTAR BACAAN

- Arief, S. 1990. Dari Prestasi Pembangunan sampai Ekonomi Politik. Kumpulan Karangan. UI-Press.
- _____, 1998. Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia. Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi. Penerbit. CPSM.
- Damanhuri, D.S. 1996. Ekonomi Politik Alternatif: Agenda Reformasi Abad 21. Penerbit Sinar Harapan.
- _____, 1999. Pilar-Pilar Reformasi Ekonomi-Politik: Upaya Memahami Krisis Ekonomi dan Menyongsong Indonesia Baru. Penerbit CIDES dan Pustaka Hidayah.
- Tindjabate, C. 2001. Kemiskinan pada Masyarakat Nelayan. Studi Tentang Proses Pemiskinan dan Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Nelayan Tradisional di Daerah Poso. Provinsi Sulawesi Tengah. Desertasi Doktor (Tidak dipublikasikan).
- Karim, M. 2003. Strategi Mengembangkan UKM Kelautan. Artikel Suara Pembaruan 21 Agustus 2003.
- Korten, D.C. 2001. Menuju abad ke-21 Tindakan Sukarela dan Agenda Global. Edisi Terjemahan. Yayasan Obor Indonesia.
- Kusumastanto, T. 2002. Reposisi "Ocean Policy" Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Di Era Otonomi Daerah. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Kebijakan Ekonomi Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB Bogor.
- Kusumastanto, T. 2003. "Ocean Policy" Dalam Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kusumastanto, T dan M. Karim. 2004. Rekonstruksi Birokrasi Kelautan dan Perikanan. PKSPL-IPB, Bogor.
- Kusumastanto, T. 2006. Ekonomi Kelautan. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Nichols, S, D. Monahan and Shuterland. 2003. Good Governance of Canada's Offshore and Coastal Zone: Towards an Understanding of the Maritime Boundry Issues.
- Saharuddin, A.H. 2001. National Ocean-Policy – New Opportunities for Malaysian Ocean Development. Marine Policy Journal No. 25 pp 427-436. Pergamon.
- Springate, O., and J. Soussan. 2001. Methodology for Policy Analysis. Livelihood-Policy Relationship in South Asia.

Stiglitz, J.E. 2010. Free Fall: America, Free Markets at the Sinking of the World Economy. W.W. Norton Eco. Inc. New York.

Vallega, A. 2001. Ocean Governance in Post Modern Society – A geographical perspective. Pergamon

PKSPL-IPB